



Artikel Penelitian

Article history:

Received 9 November, 2023

Revised 5 February, 2024

Accepted 21 March, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi, Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang, Berbasis Teknologi Informasi

Keywords:

Protection of Personal Data, Users of Money Lending and Borrowing Services, Based on Information Technology

INDEXED INSINTA - Science and Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING AUTHOR****Haposan Sahala Raja Sinaga**

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

EMAILhaposan.sinaga@uki.ac.id**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Legal Protection of Personal Data of Information Technology-Based Lending and Borrowing Service Users in Indonesia

Stephany Yunita Hotnida Sitorus¹, L Elly AM Pandiangan², Haposan Sahala Raja Sinaga^{3*}
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Abstrak: Di Indonesia, “teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari peluang dan tantangannya. Yang mendorong teknologi informasi dan komunikasi adalah globalisasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

Abstract: In Indonesia, “information and communication technology has created various very rapid developments, this can be seen in terms of opportunities and challenges. What drives information and communication technology is globalization. The formulation of the problem in this thesis relates to legal protection of personal data in online loan transactions before and after the enactment of Law 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection.”

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i3.4644

Pages: 1320-1325

LATAR BELAKANG

Artikel ini adalah skripsi yang ditulis oleh Stephany Hotnida Sitorus dan dibimbing oleh L. Elly A.M. Pandiangan dan Haposan Sahala Raja Sinaga dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul: “Perlindungan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.” Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana situasi perkembangan teknologi digital yang disertai kemajuan ekonomi dan kebutuhan masyarakat membutuhkan banyak penetrasi hal yang baru, seperti halnya layanan peminjaman uang yang membutuhkan sarana teknologi informasi. Istilahnya dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dapat disingkat LPMUBTI. LPMUBTI merupakan jasa keuangan untuk menyeleggarakan pertemuan kepada pemberi dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik menggunakan internet.

LPMUBTI atau lebih dikenal sebagai pinjaman online adalah transaksi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan peminjaman uang atau transaksi secara daring. Pencairan dananya pun bisa dalam waktu yang singkat yakni hitungan jam atau hari. Syarat umumnya adalah mengajukan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji tanpa memerlukan membutuhkan jaminan atau agunan. Namun, ketika data pribadi ini diajukan akan disimpan oleh perusahaan peminjam, ternyata kenyataannya banyak terjadi kebocoran data pribadi tersebut yang tersebar ke pihak lain yang memungkinkan bisa digunakan secara ilegal.

Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin si pemilik informasi karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang akan merugikan pemilik data. Maka dari itu jika penggunaan data diri digunakan tanpa seizin pemilik harus ada ketegasan dari penegak hukum supaya data pribadi tidak menjadi konsumsi umum dan setiap orang yang melakukan kegiatan dan merugikan orang lain haruslah diberi ketegasan secara mutlak dengan maksud mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini akan memberikan perlindungan untuk mengetahui informasi mengenai data yang ada pada pihak lain, serta untuk menumbuhkan perasaan yang lebih menjaga privasi informasi pribadi mereka.

Oleh karena itulah perlu diteliti lebih lanjut bagaimana hukum dapat melindungi permasalahan yang muncul di masyarakat utamanya dalam data pribadi yang digunakan dalam transaksi layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini akan mengumpulkan berbagai bahan hukum dengan pendekatan kepustakaan dan undang-undang utamanya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan metode penelitian inilah, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan analisis kualitatif diharapkan dapat menguraikan dengan baik maksud dari penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (disingkat “UU PDP”) sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi khususnya dalam cakupannya berkaitan dengan sistem elektronik maupun non elektronik. Diterbitkannya UU PDP dilatarbelakangi karena kesadaran negara untuk melindungi data pribadi warga negaranya sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara hendak menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlindungan diri pribadi dan permohormatas atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Sebelum adanya UU PDP, memang terdapat berbagai regulasi berkaitan tentang data pribadi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dirasa masih kurang efektif dan diperlukan suatu pengaturan lebih khusus dalam suatu undang-undang yakni UU PDP.

Definisi Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, dan Jenis Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai: “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Sementara pelindungan data pribadi adalah: “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.” (Pasal 1 angka 2 UU PDP).

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (privacy rights) terdiri dari sejumlah arti penting yaitu: “hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala distraksi; hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam; hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi terkait kehidupan personal dan informasi individu.”

Data pribadi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Pasal 4 ayat (2) mengatur data yang bersifat spesifik meliputi: “data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (3) mengatur data yang bersifat hukum meliputi: “nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Hak Subjek Data Pribadi

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Dalam Pasal 5-7 UU PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi, diantaranya: “ Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.”

Kemudian, Subjek Data Pribadi berhak untuk: “mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi. Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman.”

Hak-hak Subjek Data Pribadi di atas dikecualikan untuk: “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.”

Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi adalah pencurian data pribadi. Data pribadi yang dicuri umumnya diperjualbelikan di pasar gelap. Data ilegal tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Beberapa kejahatan yang mungkin dilakukan, antara lain: “pemerasan, penipuan, carding, klaim asuransi ilegal, dan lainnya. Ada beberapa kasus pencurian data pribadi yang sempat diperbincangkan publik, termasuk halnya dugaan data BPJS yang bocor beberapa waktu lalu. Jumlah data BPJS yang diduga bocor tersebut mencapai 279 juta data penduduk. Ironisnya, pemilik data pribadi bahkan tidak menyadari adanya penjualan data tersebut.”

Pasal 1 angka 4 UU PDP mendefinisikan Pengendali Data Pribadi adalah: “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.” Kewajiban pengendali data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 20 yaitu: “Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali kepada Subjek Data Pribadi; pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

Dalam Pasal 27, Pengendali Data Pribadi wajib: “melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.” Serta Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal: “Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.”

Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Perlindungan hukum preventif adalah “perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.” Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Di dalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

Dalam Pasal 65 UU PDP diatur larangan dalam penggunaan data pribadi, yaitu: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi; Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Sementara dalam Pasal 66, “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Ketentuan Pidana

Perlindungan hukum represif merupakan “perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan

umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.”

Dalam melindungi data pribadi warga negaranya Indonesia tidak main-main, dalam UU PDP ini pun memuat ketentuan pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melanggar ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia, sebagai berikut: Pasal 67 mengatur bahwa : “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000/000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara pada Pasal 68 diatur bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Tidak cukup hanya itu, Pasal 69 mengatur bahwa: “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.”

KESIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara hendak menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlindungan diri pribadi dan permohormatas atas pentingnya perlindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan pata pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan pengesahan suatu Undang-Undang Republik Indonesia, haruslah dengan mempertimbangkan akan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat, terkait keamanan perlindungan data pribadi. Karena setiap berkembangnya suatu teknologi, kemungkinan akan terjadi juga penyalahgunaan atau penyelewengan dan sebaiknya keamanan dalam sistem Undang-Undang RI haruslah dibuat lebih baik lagi.

Dalam pengesahan UU PDP, memanglah kita memiliki landasan hukum yang lebih eksplisit namun sangat diharapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan, dan implementasi dari perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP dapat dijalankan sebaik mungkin serta bisa ditambahkan pengaturan tentang ganti rugi secara materil kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Lutfhie Aunie, 2001, Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergaulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Rizky P.P Karo Karo, S.H., M.H dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si 2020 "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" Bandung : Penerbit Nusa Media
- Shinta Dewi, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung : Widya Padjajaran

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMENKOMINFO)
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi

Jurnal

- OJK "OJK keluarkan aturan baru terkait fintech" available from : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx>
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hlm 3
- M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*26, no. 2 (2020): 174–84.
- Oktaviani, Shella, Yeremia Juan Dewata, and Aryo Fadlian. "Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE." *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 1.2 (2021): 146-157.
- Pandiangan, L. N. E. A., Koeswidi, N., & Silitonga, N. R. (2021). How Can Environmental Dispute Resolution Be Resolved Without Going to Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245-254.
- Rizky Kurniawan, 2019, "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit", Available from: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1750>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sinaga, H. S. R. (2023). Prohibition for Indonesian Judges to Grant Requests for Registration of Marriges between People of Different Religions and Beliefs in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 135, 83.
- Tehupeiory, A., Sinaga, H. S. R., & Naibaho, L. (2021). Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID-19 Pandemic. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 482-494.



Home Current Archives Announcements Search About the Journal Contact

Search

Home / Archives / Vol. 7 No. 3: MARET 2024

Vol. 7 No. 3: MARET 2024

Published: 2024-03-13

Artikel Pengabdian

Penyuluhan Pendidikan guna Mengurangi Angka Pernikahan Dini pada Forum Anak

Educational Outreach to Reduce Early Marriage Rates at Children's Forum

✎ Mia Awaliyah, Reny Refitaningsih Peby Ria, Heri Sopian Hadi, Mohamad Yudisa Putrajip

📄 1047-1052

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4532](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4532)

 PDF

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Pendampingan Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan dari Daun Kelor Untuk Mencegah Stunting"

Community Service Activities "Assistance in Training on Processing Foodstuffs from Moringa Leaves to Prevent Stunting"

✎ Fitriani, Andi Yaumil Bay R Thaifur

📄 1053-1057

[DOI: 10.56338/jks.v1i1.370](https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.370)

 PDF

Pendampingan Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan Dari Daun Kelor Untuk Mencegah Stunting

Assistance in Food Processing Training from Moringa Leaves to Prevent Stunting

Andi Yaumil Bay R Thaifur, Jumadi, Fitriani, Eky Endriana Amiruddin, Ni'ma Meilani, Muh. Subhan

1058-1066

[DOI: 10.56338/jks.v1i1.502](https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.502)

 PDF

Strategi Substitusi Permen ke Perokok Aktif untuk Penurunan Konsumsi Rokok pada Remaja: Metode Pengelolaan Permen Susu Alternatif Hidup Sehat tanpa Rokok

Candy Substitution Strategy for Active Smokers to Reduce Cigarette Consumption among Adolescents: Alternative Milk Candy Management Method for a Healthy Life without Smoking

Andi Yaumil Bay R Thaifur, Fitriani, Jumadi, Wa Ode Nadziyran Urufia

1067-1075

[DOI: 10.56338/jks.v1i1.505](https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.505)

 PDF

Artikel Review

Stigma Penyandang Disabilitas dalam Bekerja di Indonesia: Literature Review

Stigma of People with Disabilities in Working in Indonesia: Literature Review

Rosta Rosalina, Ninik Setyowati

1076-1086

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4669](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4669)

 PDF

Pengaruh Self-compassion pada Body Image: Systematic Review

The Effect of Self-compassion on Body Image: Systematic Review

Hilma Miladiya Fauza Mukhlida

1087-1096

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4676](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4676)

 PDF

Studi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Literature Review

Health Care Quality Improvement Study: Literature Review

Andi Yaumil Bay R Thaifur

1097-1111

[DOI: 10.56338/jks.v2i1.783](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.783)

 PDF

Artikel Penelitian

Manajemen Strategi dalam Mempertahankan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah

Strategic Management in Maintaining Micro, Small and Medium Enterprises Business

👤 Fathul Huda

📄 1112-1115

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.791](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.791)

 PDF

Prediksi Karbon Monoksida Menggunakan Model Machine Learning Berdasarkan Perbandingan Model Time Series Studi Kasus DKI Jakarta

Carbon Monoxide Prediction Using Machine Learning Model Based on Time Series Model Comparison DKI Jakarta Case Study

👤 Ni Made Orcidia Wulaning Sari Sari, Hani Elindra, Agung Hari Saputra

📄 1116 - 1128

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4819](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4819)

 PDF

Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016

National Land Agency as a Mediator in the Resolution of Land Disputes Reviewed from the Regulation of the Head of BPN Number 11 Of 2016

👤 Saparudin Efendi, Maulana Syekh Yusuf

📄 1128-1135

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4513](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4513)

 PDF

Pengetahuan dan Kebutuhan Informasi Mahasiswa untuk Meningkatkan Perilaku Lingkungan

Students' Knowledge and Information Needs to Improve Environmental Behavior

👤 Dyah Ekawati Noor Fitri

📄 1136-1145

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.5036](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5036)

 PDF

Optimasi Ekstrak Daun Pecut Kuda Menggunakan Simplex Centroid Design: Kajian Sitotoksitas

Optimization of horse leaf extraction using simplex centroid design: cytotoxicity study

👤 Sri Winarni Sofya, Eka Nurul Qomaliyah, Bagus Aji Kresnapati, I Made Kawi Widana, I Gusti Nyoman

Hari Satwika

📄 1146-1150

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4963](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4963)

 PDF

Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Konsumen Membeli Mobil Merek Hyundai pada Pt. Sinar Galesong Pratama Kota Palu

Influence of Brand Image and Product Quality on Consumer Purchasing Decisions Hyundai Brand Car at Pt. Ray Galesong Pratama Palu City

👤 Asifa Oktaviani, Nur Hilal, Rizal

📄 1151-1156

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.938](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.938)

 PDF

Pengaruh Insentif dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Non Medis Pada Rumah Sakit Budi Agung Kota Palu

The Influence of Incentives and Work Environment on Non-Medical Work Morale at Budi Agung Hospital, Palu City

👤 Ni Komang Tri Yundati, Mustamir, Restutanti Borman

📄 1157-1162

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.675](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.675)

 PDF

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Motivasi Terhadap Efektivitas Guru SMK Negeri 2 Palu

The Influence of Human Resource Competency and Motivation on the Effectiveness of Teachers at SMK Negeri 2 Palu

👤 Ni Putu Lasmini, Haryanto R. Djatola, Hengky Akasse

📄 1163-1168

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.651](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.651)

 PDF

Peran Usaha Mikro di Kalangan Perempuan Berkeluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Palu Selatan

The Role of Micro Enterprises among Women with Families in Improving Family Welfare in South Palu District

👤 Nias Sirupang, Fitriana, Nurlailah

📄 1169-1176

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.665](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.665)

 PDF

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Euthanasia Pasif Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Criminal Liability of Doctors Who Perform Passive Euthanasia Based on Criminal Law in Indonesia

👤 Cicilia Anastasia, I Dewa Ayu Widyani, L. Elly AM Pandiangan

📄 1177-1186

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.659](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.659)

 PDF

Kepastian Hukum Terkait Ganti Rugi kepada Pasien dengan Adanya Perjanjian Kemitraan Antara Dokter dan Rumah Sakit

Legal Certainty Regarding Compensation to Patients with a Partnership Agreement between Doctors and Hospitals

👤 Aadilah Tsaabitah, Rospita Adelina Siregar

📄 1187-1194

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.661](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.661)

 PDF

Evaluasi Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan Dokter Spesialis di Provinsi Papua Barat

Evaluation of the Specialist Doctor Education Affirmation Program Policy in West Papua Province

👤 Lodewijk Luis Wanggai, Agustinus Philipus Djitmau

📄 1195-1202

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.649](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.649)

 PDF

Penegakan Hukum pada Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit

Law Enforcement on Environmental Pollution Due to Management of Hospital Hazardous and Toxic Waste (B3)

👤 Indra Agus Priyanto, Edi Pranoto

📄 1203-1209

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.705](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.705)

 PDF

Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

The Urgency of the Institution for Supervising Constitutional Court Judges in Supervising Constitutional Judges Who Violate the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges

👤 Dylan Tandil, Rr. Ani Wijayati, Nanin Koeswidi Astuti

📄 1210-1216

[DOI: 10.56338/jks.v2i1.641](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.641)

 PDF

Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Terhadap Minat Investasi

The Influence of Financial Literacy, Financial Inclusion, on Investment Interest

👤 Endang Purwanti

📄 1217-1224

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.5094](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5094)

 PDF

Mediasi Dalam Perkara Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dalam Hubungan Rumah Tangga Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Mediation in cases of non-fulfillment of inner life support Domestic Relations Perspective of Law Number 1 of 1974

👤 Adi Herisasono, Ade Daharis, Ach. Jaelani, Haposan Sahala Raja Sinaga, Taufik Hidayaturrahman

📄 1225-1231

[DOI: 10.56338/jks.v1i1.431](https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.431)

 PDF

Pengaruh sikap Keuangan dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Panca Bhakti Palu)

The influence of financial attitudes and financial knowledge on financial management behaviour (Study on Management Study Programme Students of Abdul Azis Lamadjido Panca Bhakti University, Palu)

👤 Swandika, Hariyanto R. Djabatola, Ririn Parmita

📄 1232-1238

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.5127](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5127)

 PDF

Analisis Fasilitas Olahraga dan Peran Pelatih dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Bulutangkis di Kota Palu

Analysis of Sports Facilities and the Role of Coaches in Improving the Performance of Badminton Athletes in Palu City

👤 Reza Hizkia Wijaya, Titi Kuswany Waty, Ririn Parmita


📄 1239-1246

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.5095](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5095)

 PDF

Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Atas Tujuan Laporan Keuangan dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM di Kecamatan Palu Barat

The Influence of Business Actors' Perceptions of the Purpose of Financial Reports and Accounting Knowledge on the Preparation of Financial Reports in MSMEs in West Palu District

 Nurul Vadya Rusli, Syamsul, Olivia H. Munayang

 1247-1253


[DOI : 10.56338/jks.v2i1.846](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.846)

 PDF

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang pada PT. Hangrace Maniora Rajaya (HMR Depo)

Implementation of an Internal Control System for Merchandise Inventory at PT. Hangrace Maniora Rajaya (HMR Depo)

 Vriska Yunistin Wengkau, Irma, Dini Rosyada

 1254-1261

[DOI : 10.56338/jks.v2i1.847](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.847)

 PDF

Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Keuangan Karyawan pada PT. Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah

The Influence of Financial Literacy and Lifestyle on Employee Financial Behavior at PT. Pertamina Patra Niaga, Central Sulawesi

 Ario Pratama Puce, Hariyanto R Djatola, Nurhadi


 1262-1267

[DOI : 10.56338/jks.v1i1.397](https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.397)

 PDF

Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Jurnalis

Analysis of Law Number 40 of 1999 on Violent Crimes for Journalists

 Bambang Sasmita Adi Putra, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Yeni Santi, Achmad Fathoni, Heri Budianto

 1268-1273

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.5161](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5161)

 PDF

Asuhan Keperawatan Keluarga pada An. Z yang Menderita Penyakit Tuberkulosis (TB)

Family Nursing Care in An. Z Suffering From Tuberculosis (TB)

👤 Faradita Malewa, Siti Yartin, Rabiah, Rosita

📄 1274-1284

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4353](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4353)

 PDF

Implementasi Relaksasi Otot Progresif untuk Menurunkan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut di RSUD Undata Palu

Implementation of Progressive Muscle Relaxation to Lower Blood Pressure in Patients Hypertension with Nursing Problems Acute Pain at Undata Palu Hospital

👤 Hadi H Palama, Sri Yulianti, Rosita

📄 1285-1291

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4357](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4357)

 PDF

Implementasi Teknik Distraksi Guided Imagery Terhadap Tingkat Ansietas pada Pasien Pre Operasi Apendisitis di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Sulawesi Tengah

Implementation of Guided Imagery Distraction Techniques on the Level of Anxiety In Pre-Patients Appendicitis Operation in A General Hospital Undata Region, Central Sulawesi

👤 Jalalludin, Sri Yulianti, Muhammad Asrum

📄 1292-1303

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4358](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4358)

 PDF

Implementasi Pencegahan Infeksi dengan Masalah Risiko Infeksi pada Pasien Post Operasi Apendisitis di RSUD Undata Sulawesi Tengah

Implementation of Infection Prevention with the Problem of Infection Risk in Post-Operating Appendicitis Patients at Undata Hospital, Central Sulawesi

👤 Agustian, Rosita, Nur Febrianti

📄 1304-1313

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.4359](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4359)

 PDF

Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja BUMDesa di Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala

The Influence of Community Perception and Participation on BUMDesa Performance in Lampo Village, Central Banawa District, Donggala Regency

👤 Nofri Suryaningsih -, Hariyanto R. Djatola, Dwi Wahyono

1314-1319

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4701](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4701)

 PDF

Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Legal Protection of Personal Data of Information Technology-Based Lending and Borrowing Service Users in Indonesia

 Stephany Yunita Hotnida Sitorus, L Elly AM Pandiangan, Haposan Sahala Raja Sinaga

1320-1325

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4644](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4644)

 PDF

Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya “Etam Mengaji” di Kabupaten Kutai Kartanegara

Legal Protection of Local Communities in Preserving the Culture of "Etam Mengaji" in Kutai Kartanegara Regency

 Aswin Aswin Zulfahmi, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo

1326-1337

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.5147](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5147)

 PDF

Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Force Majeure Oleh Debitor

Covid-19 Pandemic as Reason for Request for Postponement of Debt Payment Obligations Due to Force Majeure by Debtors

 Andyta Linda Aristy, Paltiada Saragi

1338-1348

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.4670](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4670)

 PDF

Strategi Pemasaran Pendekatan Model Pariwisata Berkelanjutan di Kota Cinta Habibie Ainun Pare-Pare

Marketing Strategy for Sustainable Tourism Model Approach in Kota Cinta Habibie Ainun Pare-Pare

 Ramdhan Kurniawan

1349-1357

[DOI : 10.56338/jks.v7i3.5170](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5170)

 PDF

Literasi Gizi dan Pola Asuhan Milenial: Implikasinya Terhadap Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini

Nutritional Literacy and Millennial Parenting Patterns: Implications for Early Childhood Stunting Incidence

👤 Ai Nurhayati, Rita Patriasih, Ai Mahmudahtusaadah, Atat Siti Nurani

📄 1358-1368

[DOI: 10.56338/jks.v7i3.5162](https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5162)



[Make a Submission](#)

- [Focus and Scope](#)
- [Editorial Board](#)
- [Reviewers](#)
- [Peer-Review Process](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Plagiarism](#)
- [Archiving Policy](#)
- [Journal History](#)



[Contact Online](#)



[Home](#)[Current](#)[Archives](#)[Announcements](#)[Search](#)[About the Journal](#)[Contact](#)[Search](#)

Editorial Board

Editor in Chief

Ahmad Yani, SKM., M.Kes, Information Technology Development Center and Journal, Departement Health Promotion, Faculty of Public Health, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia, Indonesia



Editorial Board

Sudirman, SKM., M.Kes, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Budiman, S.Pd., M.Kes, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Burhanuddin, SE., M.M, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Dr. Yusuf Hasmin, SH., MH, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Andi Famrizal, S.Sos., M.Si, FISIP, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Fikriani Aminun Omolu, S.S., M.Hum., M.Pd, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Ari Fahry, S.Sos. M.Kom. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Abdul Hafid, S.Ud., M.Ag. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Gazali, S.H.I., M.M. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

IT Support

Dirwan, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

[Make a Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Editorial Board](#)

[Reviewers](#)

[Peer-Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Copyright Notice](#)

[Plagiarism](#)

[Archiving Policy](#)

[Journal History](#)



Manuscript Template

Contact Online



**SEND US
AN EMAIL**

[Click Here](#)

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor: 230/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022
Nama Jurnal Ilmiah

Jurnal Kolaboratif Sains

E-ISSN: 26232022

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Palu

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 6

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2020 sampai Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025

Jakarta, 30 December 2022
Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP 196107061987101001